
AGRINOW!

SEPTEMBER

BULETIN PERTANIAN

Vol. 2 No. 9

Your Monthly Agriculture Update



Perempuan di Sektor Pertanian Penggerak Produksi Pangan dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Rumah Tani

www.rumahtani.com

Rumah Tani - Ketika masyarakat membicarakan ketahanan pangan, perhatian sering kali tertuju pada luas lahan, jumlah produksi, harga komoditas, teknologi pertanian, atau hasil panen. Namun, ada satu kekuatan

penting yang sering luput dari perhatian, yaitu perempuan yang bekerja dari tingkat lahan hingga meja makan keluarga. Mereka tidak hanya membantu aktivitas budidaya, tetapi juga mengambil bagian dalam pengolahan hasil, pemasaran, pengelolaan keuangan rumah tangga, hingga menentukan jenis pangan yang dikonsumsi keluarga. Peran tersebut membuat sektor pertanian memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi perempuan di pedesaan. FAO mencatat bahwa perempuan menghasilkan lebih dari 50% produk pangan dunia, sedangkan di Indonesia sekitar 38% tenaga kerja pertanian berasal dari perempuan [1][5].

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan. Data ketenagakerjaan juga memperlihatkan gambaran yang kuat. Sektor pertanian menyerap sekitar 27,99% tenaga kerja nasional, sementara sektor pertanian menyerap 47,62% angkatan kerja perempuan di wilayah pedesaan [3][4]. Pada budidaya padi sawah, kontribusi perempuan bahkan mencapai hingga 75% dari keseluruhan pekerjaan fisik di lahan, termasuk penanaman, penyiangan, dan pemanenan [6]. Angka tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi perempuan dalam pertanian bukan

sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dari proses produksi pangan sehari-hari.

Sayangnya, besarnya kontribusi tersebut belum selalu berjalan seiring dengan pengakuan ekonomi, akses terhadap sumber daya, maupun kesempatan mengambil keputusan. Banyak pekerja perempuan di pertanian masih masuk dalam kategori pekerja keluarga tanpa upah atau dianggap hanya membantu usaha keluarga [1]. Kondisi tersebut dapat mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pembiayaan, mengikuti pelatihan, memiliki lahan secara mandiri, serta mengembangkan usaha agribisnis.

Karena itu, penguatan peran perempuan perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian yang bertujuan menciptakan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan mampu menghadapi perubahan zaman.

Besarnya Peran Perempuan dalam Rantai Nilai Pertanian

Perempuan menjalankan berbagai aktivitas mulai dari sektor hulu hingga hilir. Pada kegiatan budidaya, mereka menyiapkan benih, melakukan penanaman, merawat tanaman, membantu pemupukan, dan melaksanakan panen [1]. Sejumlah pekerjaan membutuhkan ketelitian tinggi sehingga masyarakat pedesaan secara tradisional banyak melibatkan perempuan dalam aktivitas tersebut. Penanaman bibit padi atau tandur, pemilahan hasil panen, dan berbagai pekerjaan yang membutuhkan ketekunan menjadi contoh aktivitas yang menempatkan

tenaga perempuan sebagai bagian penting dalam proses produksi pangan [1]. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan kontribusi tenaga, keterampilan, dan pengalaman yang berkembang dari praktik sehari-hari.

Peran perempuan semakin terlihat pada tahap pascapanen. Mereka mengeringkan hasil pertanian, membersihkan komoditas, menyimpan stok pangan, serta mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah [1]. Aktivitas tersebut memiliki dampak ekonomi yang besar karena pengolahan dapat memperpanjang umur simpan sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Kelompok usaha mikro pedesaan, misalnya, dapat mengolah singkong menjadi keripik, pisang menjadi sale, atau daging ayam menjadi abon [1]. Aktivitas seperti ini membantu keluarga memperoleh tambahan pendapatan dan pada saat yang sama

mengurangi risiko kerugian akibat hasil panen yang tidak segera terjual.

Perempuan juga memainkan peran penting dalam aktivitas pemasaran. Mereka menjual produk melalui pasar tradisional, jaringan lokal, dan semakin banyak memanfaatkan platform perdagangan elektronik [8]. Perubahan tersebut membuka peluang baru bagi pelaku usaha desa karena teknologi digital dapat mempertemukan produsen dengan konsumen secara lebih langsung. Ketika perempuan menguasai keterampilan produksi sekaligus pemasaran, mereka dapat memperkuat posisi usaha keluarga dalam rantai nilai pertanian. Peran tersebut juga dapat membantu masyarakat desa mengembangkan komoditas lokal menjadi produk yang memiliki pasar lebih luas dan tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.

Ketahanan Pangan Keluarga Tidak Lepas dari Peran Perempuan

Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah besar. Konsep tersebut juga mencakup keterjangkauan, keamanan, mutu, keragaman, kandungan gizi, serta kemampuan masyarakat memanfaatkan pangan secara tepat [1]. Dalam rumah tangga, perempuan sering mengambil keputusan sehari-hari mengenai menu makanan, pemanfaatan hasil pekarangan, pembelian bahan pangan, dan pembagian konsumsi anggota keluarga. Keputusan tersebut secara langsung memengaruhi kualitas asupan gizi keluarga, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan.

Pengelolaan pendapatan rumah tangga juga memiliki hubungan dengan ketahanan pangan. Sejumlah penelitian

menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki kendali terhadap pendapatan rumah tangga, keluarga cenderung mengalokasikan porsi yang lebih besar untuk kebutuhan nutrisi anak, kesehatan, dan pendidikan [8]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan saja belum cukup. Keluarga juga membutuhkan pengelolaan sumber daya yang mampu mengarahkan pendapatan untuk kebutuhan yang mendukung kualitas hidup. Perempuan sering menjalankan fungsi tersebut melalui keputusan konsumsi harian yang tampak sederhana, tetapi memiliki dampak jangka panjang.

Peran tersebut menjadi semakin penting ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi atau gangguan produksi pertanian. Perempuan dapat menyesuaikan menu, memilih bahan pangan alternatif, memanfaatkan hasil kebun, dan mengatur persediaan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Pola pengelolaan seperti

itu membantu keluarga menghadapi perubahan harga dan ketersediaan pangan. Ketika masyarakat memperkuat kemampuan perempuan dalam pengelolaan pangan dan gizi, masyarakat juga memperkuat fondasi ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga [1].

Beban Ganda Menjadi Tantangan Serius bagi Perempuan Tani

Di balik kontribusinya yang besar, perempuan tani menghadapi beban kerja yang tidak ringan. Mereka menjalankan pekerjaan produktif di lahan sekaligus mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, mengasuh anak, merawat anggota keluarga lanjut usia, dan mengurus rumah tangga [2]. Masyarakat sering menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai tanggung jawab alami perempuan sehingga pekerjaan tersebut jarang memperoleh nilai ekonomi yang setara dengan pekerjaan di luar

rumah. Situasi tersebut membuat banyak perempuan harus membagi waktu antara kegiatan pertanian dan kebutuhan keluarga sepanjang hari.

Tekanan tersebut dapat meningkat ketika wilayah pedesaan menghadapi kekeringan, krisis iklim, atau perubahan fungsi lahan. Perempuan harus meluangkan lebih banyak waktu untuk memperoleh air bersih dan bahan bakar rumah tangga ketika sumber daya alam semakin sulit dijangkau [7]. Waktu yang semakin terbatas kemudian mengurangi kesempatan mereka untuk mengikuti pelatihan, mempelajari informasi pasar, meningkatkan keterampilan teknis, atau mengembangkan usaha. Dengan kata lain, perubahan lingkungan tidak hanya memengaruhi produksi pertanian, tetapi juga memengaruhi distribusi waktu dan kesempatan ekonomi di dalam rumah tangga.

Kondisi beban ganda juga dapat memengaruhi kemampuan perempuan mengambil keputusan

strategis dalam usaha tani. Ketika seseorang menghabiskan sebagian besar waktu untuk pekerjaan domestik, ia memiliki ruang yang lebih sedikit untuk menghadiri pertemuan kelompok tani, mengikuti penyuluhan, mengakses layanan keuangan, atau membangun jaringan pemasaran. Karena itu, program pemberdayaan tidak cukup hanya menyediakan pelatihan. Penyelenggara juga perlu menyesuaikan waktu, metode, lokasi, serta bentuk pendampingan dengan kondisi nyata perempuan di pedesaan [2][8]. Langkah tersebut dapat membuka ruang yang lebih luas agar mereka mampu mengembangkan potensi ekonominya.

Kesenjangan Akses Lahan, Modal, dan Teknologi Masih Menghambat

Akses terhadap lahan menjadi salah satu tantangan struktural yang penting. Lahan merupakan aset produktif utama dalam kegiatan

pertanian, tetapi secara global kurang dari 15% pemilik lahan pertanian merupakan perempuan [12]. Di Indonesia, perempuan secara hukum dapat memiliki tanah, tetapi praktik sosial dan adat sering mendorong pencatatan sertifikat atas nama kepala keluarga laki-laki [6][12]. Ketika perempuan tidak memiliki bukti kepemilikan secara mandiri atau bersama, mereka dapat mengalami kesulitan ketika ingin mengembangkan investasi jangka panjang pada lahan atau mengakses program pemerintah yang mensyaratkan dokumen kepemilikan.

Keterbatasan kepemilikan aset juga dapat menghambat akses pembiayaan formal. Perbankan menggunakan sejumlah pertimbangan dalam analisis kredit, termasuk collateral atau agunan [14]. Sertifikat tanah atau aset fisik lain sering menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Ketika perempuan tidak memiliki aset yang dapat mereka gunakan sebagai

agunan, mereka dapat mengalami kesulitan memperoleh modal usaha. Kondisi tersebut dapat mendorong sebagian pelaku usaha bergantung pada sumber pembiayaan informal seperti tengkulak atau rentenir dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi [15]. Hambatan finansial kemudian membatasi kemampuan mereka membeli sarana produksi, memperluas usaha, atau meningkatkan kapasitas pengolahan.

Teknologi juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Aplikasi cuaca, sistem informasi harga, platform e-commerce, dan berbagai teknologi pertanian digital dapat membantu petani mengambil keputusan dengan lebih cepat [2]. Namun, kesenjangan akses perangkat dan literasi digital masih membatasi perempuan di sejumlah wilayah pedesaan. Program penyuluhan juga sering berfokus pada ketua kelompok tani yang mayoritas laki-laki, sehingga perempuan tidak selalu memperoleh

kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan [2]. Akibatnya, sebagian perempuan lebih lambat mengadopsi teknologi pertanian cerdas iklim dan strategi pemasaran digital. Penguatan literasi digital

perlu berjalan bersama dengan peningkatan akses perangkat agar teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha tani.

Tabel 1. Hambatan perempuan dibidang pertanian

Dimensi Hambatan	Akar Permasalahan Utama	Mekanisme Marjinalisasi	Implikasi terhadap Ketahanan Pangan
Akses Lahan	Patriarki hukum adat & administrasi pertanahan	Sertifikasi mayoritas atas nama suami/kepala keluarga ¹² .	Hilangnya agunan kredit & ketidakpastian investasi lahan ⁸ .
Akses Modal	Persyaratan perbankan formal (Analisis 5C)	Ketiadaan agunan fisik & literasi keuangan terbatas ¹⁴ .	Ketergantungan pada tengkulak & modal kerja terbatas ¹⁵ .
Kelembagaan	Dominasi laki-laki dalam kelembagaan desa	Perempuan dianggap sekadar "anggota keluarga" ² .	Pengecualian dari forum pengambilan keputusan strategis ² .
Penyuluhan	Bias gender pada jadwal & metode pelatihan	Pelatihan diselenggarakan pada jam kerja domestik ⁸ .	Keterlambatan adopsi inovasi benih & teknik ramah iklim ² .
Teknologi Digital	Kesenjangan akses gawai & literasi digital	Akses perangkat digital diutamakan untuk laki-laki ² .	Keterbatasan akses informasi harga pasar langsung ² .

Perubahan Iklim Mendorong Kebutuhan Adaptasi yang Lebih Inklusif

Perubahan iklim meningkatkan risiko bagi sektor pertanian melalui kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem [11]. Risiko tersebut dapat menurunkan hasil panen dan mengganggu pendapatan keluarga. Namun, dampak perubahan iklim tidak terbagi secara merata antara laki-laki dan perempuan. Keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, informasi, dan layanan publik membuat perempuan menghadapi tingkat kerentanan yang lebih tinggi dalam banyak kondisi [11].

Ketika gagal panen menekan pendapatan keluarga, perempuan sering melakukan pengorbanan konsumsi pribadi agar anak dan anggota keluarga lainnya tetap

memperoleh makanan yang cukup [11]. Mereka juga dapat menghadapi peningkatan beban kerja ketika sumber air semakin jauh atau bahan pangan alternatif semakin sulit ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga terhadap perubahan iklim sangat bergantung pada kemampuan semua anggota rumah tangga memperoleh sumber daya adaptasi. Masyarakat perlu melihat perempuan sebagai pelaku utama strategi adaptasi, bukan hanya sebagai kelompok yang mengalami dampak.

Pengetahuan lokal dapat menjadi modal penting dalam menghadapi perubahan lingkungan. Perempuan memiliki pengalaman dalam menjaga keanekaragaman hayati, memilih benih lokal, dan mengelola tanah serta sumber daya alam [11]. Ketika pelatihan dan teknologi mendukung pengetahuan tersebut, mereka dapat menerapkan berbagai strategi adaptasi, seperti

menanam tanaman pangan tahan kekeringan, memanen air hujan, menggunakan irigasi tetes skala kecil, serta memanfaatkan pupuk organik dan pestisida hayati [9][11]. Diversifikasi komoditas dengan umbi-umbian dan sorgum juga dapat membantu menjaga pasokan pangan ketika tanaman utama mengalami gangguan [11].

KWT, P2L, dan KUR Membuka Ruang Penguatan Ekonomi

Kelompok Wanita Tani atau KWT menjadi salah satu wadah penting untuk memperluas partisipasi perempuan dalam agribisnis pedesaan. KWT menyediakan ruang untuk belajar secara kolektif, bertukar pengalaman, memperoleh alih teknologi, mengembangkan permodalan mikro, dan membangun jaringan pemasaran [8][9]. Melalui organisasi tersebut, anggota dapat melatih keterampilan kepemimpinan, meningkatkan

kemampuan negosiasi harga, serta memperkuat manajemen usaha. Kelembagaan berbasis komunitas juga memberi kesempatan kepada perempuan untuk membangun jejaring sosial yang mendukung keberlanjutan usaha.

Program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L memberikan peluang lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan kosong, maupun lahan marginal desa. Program tersebut mengarahkan KWT untuk membangun kebun gizi produktif melalui rumah bibit, kebun percontohan, pengembangan tanaman anggota, dan pengelolaan pascapanen [18][21]. Program tersebut membantu keluarga meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus menekan pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Evaluasi partisipasi KWT dalam P2L juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara tingkat partisipasi anggota dengan tingkat ketahanan pangan rumah tangga [10][22].

Dari sisi permodalan, pemerintah menyediakan KUR sektor pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2021. Regulasi tersebut menekankan inklusivitas dan memberikan perhatian kepada petani kecil, petani milenial, serta wanita tani [15]. Pemanfaatan KUR dapat membantu petani memperoleh modal kerja untuk meningkatkan kegiatan usaha. Analisis pemanfaatan KUR dalam usaha tani juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan [14]. Ketika petani mengelola tambahan modal secara produktif, mereka dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat akumulasi modal, dan memperbaiki kesejahteraan keluarga.

Membangun Pertanian yang Lebih Inklusif

Penguatan peran perempuan membutuhkan kebijakan yang berjalan secara berjenjang. Pada

tingkat nasional, pemerintah dapat memperkuat administrasi pertanahan yang responsif gender, termasuk mendorong pencatatan kepemilikan bersama antara suami dan istri dalam program pendaftaran tanah [12]. Pemerintah juga dapat menerapkan penganggaran responsif gender agar program pertanian menyediakan anggaran yang jelas untuk pelatihan, pemberdayaan, alat dan mesin pertanian, serta fasilitas lain yang mendukung pelaku usaha perempuan [7]. Kebijakan tersebut dapat memperkuat kepastian akses terhadap sumber daya produktif.

Pada tingkat kelembagaan, penyuluh pertanian perlu menyesuaikan jadwal dan metode pelatihan dengan kondisi perempuan di pedesaan. Kegiatan penyuluhan yang berlangsung pada jam kerja domestik dapat membatasi partisipasi. Karena itu, penyelenggara perlu memilih waktu dan metode yang lebih fleksibel sekaligus meningkatkan

keterwakilan perempuan dalam kelompok tani dan koperasi desa [2]. Pendekatan tersebut dapat memperluas akses informasi sekaligus membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, pembiayaan, dan teknologi.

Pada tingkat rumah tangga dan komunitas, masyarakat dapat menghubungkan KWT dan P2L dengan program pangan lokal, pemenuhan gizi, serta pencegahan masalah gizi anak. Komunitas juga dapat mengembangkan sekolah lapang yang membahas pertanian cerdas iklim, konservasi air, pembuatan input organik, dan diversifikasi tanaman [7]. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun ketahanan sosial ketika masyarakat menghadapi bencana dan tekanan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, kelompok masyarakat,

lembaga keuangan, penyuluh, dan pelaku usaha dapat menciptakan ekosistem pertanian yang memberi ruang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang.

Perempuan memiliki kontribusi yang sangat luas dalam sistem pertanian Indonesia. Mereka bekerja di lahan, menangani kegiatan pascapanen, mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah, memasarkan hasil usaha, serta mengelola kebutuhan pangan dan gizi keluarga [1][8]. Data mengenai partisipasi tenaga kerja, kontribusi pada budidaya padi, dan peran dalam rumah tangga menunjukkan bahwa keberadaan mereka memiliki hubungan erat dengan ketahanan pangan. Namun, kesenjangan akses terhadap lahan, modal, teknologi, pelatihan, dan forum pengambilan keputusan masih membatasi potensi tersebut [2][12][14].

Pertanian yang tangguh membutuhkan pendekatan yang mengakui seluruh pelaku di dalam

rantai pangan. Pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan akses yang lebih setara terhadap aset produktif, pembiayaan, teknologi, penyuluhan, serta kelembagaan lokal. Penguatan KWT, optimalisasi P2L, perluasan akses KUR, dan pengembangan pertanian cerdas iklim dapat menjadi bagian dari strategi tersebut [9][10][15]. Ketika perempuan memperoleh ruang, pengetahuan, modal, dan kesempatan mengambil keputusan yang lebih luas, masyarakat tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga membangun fondasi ketahanan pangan pedesaan yang lebih berkelanjutan.

Rujukan

- [1] Jumiaty, A., Aryani, E. & Ikayani, E. S. "Sosialisasi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3(6), 2980–2984 (2025).
- [2] Ilham, D., & Alam, S. (2026). Perempuan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan: Membangun Peradaban Inklusif Melalui Kepemimpinan Lokal di Era Society 5.0: Women, Food Security, and Sustainable Agriculture: Building an Inclusive Civilization Through Local Leadership in the Era of Society 5.0. *ASCIDIA: As' adiyah Multidisciplinary Proceedings*, 1(3), 159-164.
- [3] GoodStats. "Hampir 28% Pekerja Indonesia Berada di Sektor Pertanian pada 2025."
- [4] DP3AK Provinsi Jawa Timur. "47,62% Angkatan Kerja Perempuan di Perdesaan dari Sektor Pertanian." <https://dp3ak.jatimprov.go.id/news/4762-angkatan-kerja-perempuan-di-perdesaan-dari-sektor-pertanian>

- [5] Indonesian Journal. “38 Persen Tenaga Kerja Pertanian Nasional Disumbang Perempuan Petani.”
- [6] Food and Agriculture Organization (FAO). *Women in Agriculture, Environment and Rural Production*.
<https://www.fao.org/4/AD520e/AD520e00.pdf>
- [7] Food and Agriculture Organization (FAO). *Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Indonesia*.
<https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/ca6110en>
- [8] Harudin, L. et al. “Peran Gender dalam Pemberdayaan Agribisnis Masyarakat Desa.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi* 1(3), 149–162 (2025).
- [9] Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. “Giat Kelompok Wanita Tani (KWT).”
- [10] “Hubungan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga.”
- [11] Barki, K. & Burhan, A. “Peran Gender dalam Ketahanan Pangan: Tantangan Wanita Menghadapi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian” (2025).
- [12] Food and Agriculture Organization (FAO). “The Gender Gap in Land Rights.”
- [14] “Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Peningkatan Pendapatan Usaha Tani.”
- [15] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “KUR Sektor Pertanian: Solusi Modal bagi Petani Milenial.”